

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Theory of Planed Behavior*

*Theory of Planed Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA dijelaskan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975 menyatakan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms*, kemudian dikembangkan oleh Ajzen tahun 1991 dalam TPB yang menambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (Wahyono 2014).

*Theory of Planed Behavior* (TPB) ditentukan oleh tiga variabel, yaitu:

##### 1) *Attitude* (sikap)

Sikap merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Sebagai contoh, apabila seseorang menganggap sesuatu bermanfaat bagi dirinya maka dia akan memberikan respon positif terhadapnya, sebaliknya jika sesuatu tersebut tidak bermanfaat maka akan memberikan respon negatif.

## 2) *Subjectif Norms* (Norma Subjektif)

Norma subjektif merupakan persepsi seseorang tentang pikiran orang lain yang akan mendukung atau tidaknya dalam melakukan sesuatu. Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa orang lain mendorong atau menghambat untuk melaksanakan perilaku. Seorang individu akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain yang menyetujuinya untuk melakukan perilaku tersebut.

## 3) *Perceived Behavioral Control* (Kontrol Perilaku)

Kontrol perilaku merupakan persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku (Wahyono, 2014).

Implikasi *Theory of Planed Behavior* (TPB) dalam penelitian ini adalah bahwa tindakan pengelola untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat didasarkan pada niat yang dibentuk dari tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku, seperti dengan adanya *employee engagement* yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

## 2. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Ihsanti,2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur mengenai unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, yang terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih), laporan finansial (terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas), serta catatan atas laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan perusahaan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait (Ernawati dkk, 2019).

### 3. Kualitas Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat bagi para pemakainya jika laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya memiliki kriteria tersendiri. Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang akuntansi pemerintah, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Karakteristik laporan keuangan menurut peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010 karakteristik laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1. Relevan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna ataupun manajerial. Informasi tersebut juga digunakan untuk membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa yang akan datang, dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud dari pengguna. Ada tiga syarat yang harus terpenuhi supaya laporan

keuangan tersebut dapat dikatakan relevan yaitu prediktif, umpan balik dan tepat waktu.

2. Andal. Keandalan suatu informasi dalam laporan keuangan artinya bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan yang material. Fakta dalam informasi harus disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Ciri-ciri informasi yang handal adalah lengkap, dapat diuji dan netral.
3. Dapat dipahami. Suatu informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila informasi yang disajikan mudah untuk dipahami pengguna laporan keuangan. Informasi yang disajikan dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dan pengetahuan pengguna.
4. Dapat dibandingkan. Suatu informasi dalam laporan keuangan dikatakan bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis. Perbandingan dapat dilakukan dengan cara internal maupun secara eksternal. Perbandingan dengan cara internal dapat dilakukan bila suatu entitas dari tahun ke tahun menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 71 tahun 2010, itu berarti pemerintah daerah sudah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menghasilkan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **4. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Indriasih (2014) “Sumber Daya Manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya”. Suatu sistem yang baik tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan.

Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, yaitu untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (out comes) (Ihsanti, 2014). Sedangkan menurut Hutapea (2008) menyatakan bahwa ada tiga buah komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.

## 1. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang tertentu. Informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam kondisi nyata. Berhasil atau tidaknya sebuah tugas akan dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seorang pegawai. Maka dari itu pegawai yang memiliki pengetahuan cukup baik akan lebih meningkatkan efisiensi kerja dalam melaksanakan tugasnya.

## 2. Keterampilan

Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan sama dengan memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok. Didalam melaksanakan tugasnya, selain memiliki pengetahuan cukup pegawai juga perlu memiliki keterampilan khusus. Keterampilan ini diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini diperlukan saat berkomunikasi, memotivasi orang lain, maupun dalam menjalankan tugasnya agar terlaksana dengan mudah dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau sebuah instansi.

### 3. Perilaku/Sikap

Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Pegawai diharapkan memiliki sikap yang mendukung tujuan sebuah organisasi dalam perusahaan. Apabila pegawai sudah memiliki sikap tersebut maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Ernawati, Budiyono 2019)

### 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi semakin lama semakin meningkat. Teknologi Informasi (TI) ini berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi informasi di Indonesia ikut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern (Ernawati dkk, 2019).

“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan

merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan” (Sutabri,2014).Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar (Ernawati dkk, 2019).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Ernawati dkk 2019).

## **6. Sistem Pengendali Internal**

Menurut Mulyadi (2010) untuk menjaga kekayaan organisasi, menegcek keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakkan manajemen perlu adanya suatu koordinasi sistem penendalian interal yang meliputi organisasi, metode, dan ukuran-ukuran data tersebut.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem pengendalian internal sebuah organisasi.

Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengacu pada unsur SPI yang telah di praktikan pada lingkungan pemerintahan di berbagai Negara yang meliputi :

### **1. Lingkungan Pengendalian**

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 4 seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib menciptakan suatu lingkungan pengendalian yang memiliki perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompeten

- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2. Penilaian resiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsistensi baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan. Kemudian mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko (PP No. 60 Tahun 2008).

## 3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi

selama proses penilaian resiko (PP No. 60 Tahun 2008). Mahmudi (2010) menyebutkan, komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian intern khususnya kegiatan pengendalian yaitu 1) sistem dan prosedur akuntansi, 2) otorisasi, 3) formulir, dokumen, dan catatan, serta 4) pemisahan tugas.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Pada PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

#### 5. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern dalam PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui

penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas terpisah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

### B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel yang digunakan	Hasil
1	Diani 2014	X1=Pengaruh pemahaman akuntansi X2=pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah X3=peran internal audit Y=kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan berpengaruh negative terhadap kualitas laporan keuangan, dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
2	Synthiaa 2016	X1=The Effect of Human Resources Competence X2=Application of Regional Financial Accounting Systems Y= Quality of Financial Report	1. sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas keuangan pemerintah daerah. 2. sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3	Kalumataka dkk, 2016	X1=Pengaruh kompetensi sumber daya manusia X2= teknologi informasi X3=riviu laporan keuangan X4= sistem pengendalian internal Y=kualitas laporan keuangan	Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan teknologi informasi, riviu laporan, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

No	Nama Peneliti	Variabel yang digunakan	Hasil
4	Lestari, Amilin 2016	X1=SDM X2= sistem pengendalian internal X3=standar akuntansi pemerintahan Y=kualitas laporan keuangan	SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif namun tidak signifikan, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
5	Hardyansyah 2016	X1=Pengaruh kompetensi SDM X2=pemanfaatan teknologi informasi Y=kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variable moderasi	Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variable moderating menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
6	Oktaviyanti dkk, 2017	X1=Pengaruh Pengendalian internal X2=Kompetensi SDM X3=Budaya Etis organisasi Y=Kualitas lapoan keuangan	Secara parsial pengendalian internal, kompetensi SDM, dan budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

No	Nama Peneliti	Variabel yang digunakan	Hasil
7	Siwambudi dkk, 2017	X1=Komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi SDM X2= sistem pengendalian intern Y=kualitas laporan keuangan	Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun komitmen organisasi, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
8	Tampaty 2017	Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan (studi kasus pada SKPD kabupaten Bondowoso)	Kompetensi Sdm berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
10	Trisnawati dan Wiratmaja 2018	X1=kualitas SDM X2=sistem pengendalian intern Y=kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Pengaruh kualitas SDM dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

No	Nama Peneliti	Variabel yang digunakan	Hasil
11	Kurniawati dkk 2018	X1=Pengaruh kualitas SDM X2=pemanfaatan teknologi informasi X3=sistem pengendalian intern akuntansi Y=keterandalan laporan keuangan	Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem penegndalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan
12	Ernawati dan Budiyono 2019	X1=Pengaruh kompetensi sumber daya manusia X2=pemanfaatan teknologi X3=sistem pengendalian intern Y=kualitas laporan keuangan rumah sakit umum	Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian interal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan rumah sakit umum
13	Zubaidi 2019	X1=Pengaruh kompetensi SDM X2=pemanfaatan teknologi informasi Y=kualitas laporan keuangan	Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan,

### C. Kerangka Pemikiran

Hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah menurut Wahyono (2004:12) adalah dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan

mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan) Tawaqal dan Suparno (2017).

Dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 mengatur juga kewajiban pemerintah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola informasi secara cepat dan akurat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu (Armel, 2017).

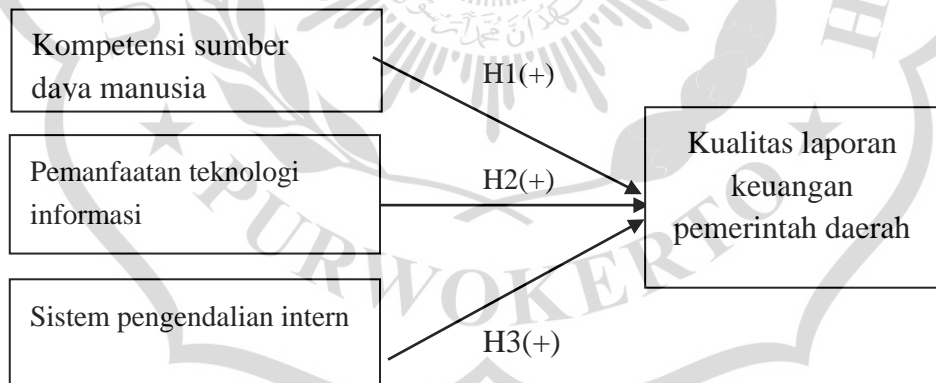
*Financila Accounting Standard Board* (FASB)telah menyadari bahwa sistem pengendalian internal memiliki keterlibatan dalam proses pelaporan keuangan dan berkontribusi aktif untuk menciptakan praktik *corporate*

*governance* yang telah efektif FSAB (2000). Untuk mendapatkan kualitas yang baik tidak hanya sistem akuntansi saja yang dibutuhkan akan tetapi sistem pengendalian internal dalam pemerintahan itu sendiri harus berjalan dengan baik (Tawaqal dan Suparno, 2017).

Sistem pengendalian internal bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. Sistem pengendalian internal akan membantu memandu entitas berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan riarebel Arens (2008 : 370).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kerangka pemikiran yang diketahui yaitu sebagai berikut :

#### Model kerangka pemikiran



## **D. Hipotesis Penelitian**

### **1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas**

#### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal sangat penting dalam pemerintah untuk mencapai tujuan laporan keuangan. Dalam pengelolaan Keuangan yang baik, SKPD harus memiliki Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Kalumata dkk, 2016).

Apabila kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki keahlian dibidangnya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan. Seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang baik, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan (Edlin, 2018).

Penelitian yang mendukung tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Synthia (2016) dengan hasil penelitian bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagusnya kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.

Kurniawati dkk (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan, dan penelitian Trisnawati dan Wiratmaja (2018) menunjukkan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis dimaksudkan untuk meneliti kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.**

## **2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan

dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan.

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah. Pemerintah juga harus menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang pesat untuk meningkatkan kinerja para pegawai serta membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Menurut penelitian yang mendukung tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Alamsyah dkk (2017) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Idward dkk (2018) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan penelitian Kurniawati dkk (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

### **3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Arens (2008), pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Sistem pengendalian intern yang tinggi akan meningkatkan otorisasi pemisahan tugas, maka tidak ada pegawai yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan upaya pencegahan penggelapan akan berhasil.

Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi baik organisasi bisnis maupun sektor publik seperti organisasi pemerintah. Rofika dkk (2015) menyatakan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Semakin baiknya pengendalian internal maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Dalam penelitiannya Rahmawati dkk (2018) menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Oktaviyanti dkk (2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika semakin

tinggi penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

